

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini mengkaji persoalan tentang peran Partai Gerindra dalam keterwakilan politik perempuan di parlemen pada pemilu legislatif DPR RI tahun 2019. Keterwakilan politik perempuan dari Partai Gerindra belum mencapai 30% di parlemen (data spasial.id, 2020). Tetapi, di dalam struktur organisasi Partai Gerindra terjadi peningkatan pada jumlah kepengurusan perempuan yang sudah mencapai 33,56% (Kompas.com). Selama dua periode keterwakilan politik perempuan Partai Gerindra tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data caleg perempuan yang diikutsertakan Partai Gerindra dari periode 2009-2014 bertambah 6,1% dan periode 2014-2019 hanya bertambah 1,6%. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Partai Gerindra tidak siap untuk merekrut caleg perempuan.

Partai Gerindra yang di ketuai oleh Prabowo Subianto merupakan partai baru yang terbentuk dari sejumlah pertemuan-pertemuan para politisi, akademisi, pengusaha, aktivis dan purnawirawan militer (Rezky, 2017:2) dan didirikan pada 6 februari 2008. Partai Gerindra memperlihatkan kemajuan di pemilu tahun 2009 yang berhasil menempati 26 kursi dengan memperoleh 4.646.406 (4,5%) suara dan pada pemilu tahun 2014 Partai Gerindra berhasil menempati 73 kursi dengan memperoleh 11,81% suara. Kemajuan ini merupakan upaya Partai Gerindra dalam mengenalkan partai nya sehingga mampu untuk bersaing (Nurdiansyah, 2018:11). Kemajuan Partai Gerindra di dalam mengenalkan partainya justru tidak menjadikan Partai Gerindra dapat meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Hal ini terlihat dari keterwakilan politik perempuan Partai Gerindra yang sampai saat ini tidak mencapai 30% di parlemen.

Keterwakilan politik perempuan yang belum mencapai 30% di parlemen merupakan permasalahan yang sampai saat ini terjadi. Padahal Pemerintah menerapkan aturan minimal 30% yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD peningkatan keterwakilan perempuan di lakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%

di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD (Mulyono, 2016:2). Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum bahwa partai politik di haruskan menyertakan paling sedikit 30% pada kepengurusan partai politik ataupun dalam pemilu anggota DPR RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017). Tetapi penerapan minimal 30% tidak menjadikan partai politik khususnya Partai Gerindra menghadirkan 30% perempuan di parlemen.

Penerapan aturan 30% yang di terapkan di struktur kepengurusan Partai Gerindra dan didalam mengajukan calon anggota legislatif bukanlah satu-satunya upaya yang dapat meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Upaya dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan juga harus dilakukan oleh Partai Gerindra. Hal ini dikarenakan partai politik merupakan salah satu platform dalam mengakomodasi keterwakilan politik perempuan dan partai politik memiliki peran penting dalam memenuhi kepentingan perempuan melalui pembuatan kebijakan publik yang berasal dari anggota-anggota partai yang terpilih dalam pemilihan umum dan terpilih untuk memimpin di kursi pemerintahan (Wahyudi,2018:67), hal ini juga menjadikan partai politik sebagai sarana yang sangat efektif untuk memperjuangkan kepentingan dan isu perempuan.

Peran partai politik didalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan dapat dilakukan dengan memperhatikan isu perempuan atau isu *gender* dan meningkatkan kehadiran perempuan di berbagai bidang pada partai politik, mendukung, memprioritaskan kegiatan pada kesetaraan *gender* (Sacchet,2005:2). Pelatihan-pelatihan yang dilakukan partai politik terhadap caleg perempuan juga dapat dilakukan dengan tujuan mendorong potensi pada kepemimpinan perempuan sehingga dapat mempromosikan perempuan (Morgan,2016:14). Adapun bentuk dari keberhasilan keterwakilan politik perempuan di parlemen dapat terlihat dari faktor internal partai politiknya.

Faktor internal partai politik dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen dapat dilihat dari proses rekrutmen yang berjalan. Rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik

dan khususnya pada pemerintahan (Surbakti,1992:113). Proses rekrutmen bertujuan untuk menyeleksi orang-orang yang ingin ikut serta dalam pemilu dan mampu memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan partai politik, hal ini menjadikan rekrutmen sebuah proses inti yang akan mempengaruhi kualitas caleg perempuan (Ulum,2017:224). Proses rekrutmen yang berlangsung menurut Czudnowski dalam Fadillah Putra (2007:103) dapat terbagi menjadi dua tahapan yaitu rekrutmen terbuka merupakan syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas; rekrutmen tertutup merupakan syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum.

Secara umum, rekrutmen dilakukan dengan mengajukan nama-nama caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bagian dari tahapan pemilihan umum, dan dalam mekanisme internal partai politik proses rekrutmen berlangsung dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh partai politik. Partai Gerindra memiliki AD/ART dalam menentukan calon anggota legislatifnya, berdasarkan anggaran dasar partai yang terdapat pada bab 5 pasal 15 ayat 4 menjelaskan bahwa kader Partai Gerindra dipersiapkan untuk menjadi calon pengurus partai, bakal calon Anggota DPR dan DPRD, bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, bakal calon Presiden atau Wakil Presiden. Partai Gerindra mengutamakan kader untuk menjadi bakal calon tetapi tidak menutup untuk bakal calon yang juga berasal dari masyarakat seperti halnya yang tertera dalam anggaran rumah tangga Partai Gerindra pada bab 1 pasal 5 ayat 2 yang mengatakan Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi kader luar biasa sesuai strata kader berdasarkan prestasi yang luar biasa.

Partai Gerindra memiliki ambisi kuat di dalam pemilu tahun 2019. Mengutip media elektronik yaitu media.com menjelaskan bahwa Prabowo menargetkan partainya bisa menang pemilu tahun 2019. Hal ini terlihat dari Partai Gerindra yang lolos dari ambang batas *Parliamentary Threshold* pada pemilu tahun 2019 yang memperoleh 78 kursi dengan persentase keterwakilan politik perempuan di parlemen 15,38%. Namun, persentase ini merupakan persentase yang lebih rendah daripada partai-partai lain yang juga lolos *Parliamentary Threshold* (dataspasial.id, 2020). Melihat kesenjangan permasalahan keterwakilan politik perempuan Partai Gerindra di parlemen yang tidak mencapai 30% namun, kehadiran perempuan di

struktur organisasi Partai Gerindra justru meningkat menjadi faktor alasan peneliti menjadikan Partai Gerindra sebagai objek penelitian.

Berdasarkan dari konteks di atas penting untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan mengenai peran Partai Gerindra dalam rekrutmen keterwakilan politik perempuan di parlemen, sebab kebijakan kehadiran perempuan di dalam kepengurusan partai politik dan di dalam pencalonan calon legislatif tidak satu-satunya aspek dalam mendorong keterwakilan politik perempuan di parlemen. Sehingga perlu untuk melihat faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap keterwakilan politik perempuan di parlemen. Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengkaji dengan menggunakan pendekatan teori Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Pemilu (2002) Richard E. Matland dengan melihat proses rekrutmen calon legislatif perempuan yang dilakukan partai politik, kebijakan internal partai politik terhadap perempuan, hambatan dan tantangan dari partai politik dalam mencari kandidat calon legislatifnya.

1.2 Penelitian Terdahulu

1. **Penelitian Aisah Putri Budiatri (2012) berjudul *Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI Dan DPRD)*** Penelitian ini menggunakan pendekatan teori keterwakilan perempuan politik ide dan politik keterwakilan. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan baik di DPR RI ataupun di DPRD terlihat bahwa perempuan belum di prioritaskan. Rendahnya keterwakilan perempuan tidak terlepas dari peran partai politik yang merupakan wadah bagi perempuan untuk terjun ke parlemen. Selain itu, penelitian Aisah Putri Budiatri (2012) mengemukakan bahwa partai politik yang menang dalam pemilu mempunyai pengaruh cukup penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dan juga memiliki pengaruh dalam menentukan

Pada sisi politik ide Aisah Putri Budiatri (2012) juga mengemukakan bahwa laki-laki tidak memprioritaskan perempuan hal ini terlihat pada kebijakan-kebijakan partai yang tidak ramah gender dan partai politik yang tidak berkomitmen untuk mendorong keterwakilan perempuan seperti halnya ketiadaan

aksi afirmasi dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART), visi-misi partai politik serta rendahnya pencalonan perempuan dalam pemilu.

Pada sisi politik kehadiran Aisah Putri Budiatri (2012) mengemukakan bahwa Indonesia yang memiliki 49% penduduk perempuan seharusnya dapat membentuk aturan di dalam struktur partai yang ramah gender dan memprioritaskan kepentingan perempuan dan aturan tersebut harus memiliki kekuatan hukum sehingga mampu mengikat partai politik untuk menjalankan komitmen tersebut.

Relevansi penelitian Aisah Putri Budiatri (2012) dengan penelitian ini adalah persamaan yang diteliti yaitu mengenai keterwakilan perempuan di parlemen dan memberikan sumbangsih ide mengenai pandangan terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian Aisah Putri Budiatri (2012) dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat penyebab belum tercapainya 30% keterwakilan perempuan Partai Gerindra pada pemilu DPR RI tahun 2019.

2. Penelitian Isnaini Anis Farhah (2018) berjudul *Partai Politik Dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik Dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Lebak Periode 2014-2019)* menemukan bahwa terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lebak rendah diantaranya adalah persoalan mengenai pendidikan, kesehatan, dan kekerasan yang menyebabkan dan mempengaruhi kehidupan perempuan. Peningkatan keterwakilan perempuan di Kabupaten Lebak tidak seimbang dengan jumlah perempuan yang menempati kursi jabatan di DPRD periode 2014-2019 yaitu jumlah perempuan hanya 7 orang dari total 50 orang.

Selain itu, penelitian Isnaini Anis Farhah (2018) juga mengemukakan bahwa partai politik belum menjalankan fungsi rekrutmen politik dengan baik dalam mengantarkan caleg perempuannya mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lebak periode 2014-2019. Adapun penyebab partai politik sulit untuk memenuhi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lebak yaitu berasal dari faktor sosio-ekonomi, kendala ideologis dan psikologis. Dalam kendala politik

pun terdapat kurangnya dukungan dari partai politik dan melekatnya model maskulin dari partai politik tersebut dan terdapat bias gender, kurangnya hubungan kerjasama dengan masyarakat serta kurang maksimal dalam sistem pelatihan kaderisasi dan pendidikan politik yang masih menyebabkan partai politik sulit untuk memenuhi keterwakilan perempuan.

Relevansi penelitian Isnaini Anis Farhah (2018) dan penelitian ini adalah persamaan mengenai permasalahan yang dikaji yaitu tentang keterwakilan perempuan. Penelitian Isnaini Anis Farhah (2018) memberikan sumbangsih ide bagi peneliti mengenai kendala-kendala yang menyebabkan keterwakilan rendah di DPRD Kabupaten Lebak. Namun perbedaan penelitian ini memfokuskan rendahnya keterwakilan perempuan Partai Gerindra di DPR RI tahun 2019.

3. Penelitian Sheri Kunovich and Pamela Paxton (2005) berjudul *The Role of Political Parties in Women's National Political Representation* mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persentase perempuan di parlemen yaitu struktural, politik, dan ideologis. Pada struktural, pendidikan perempuan akan mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, persentase perempuan yang aktif dapat mempengaruhi hasil politik bagi perempuan, seperti persentase kandidat perempuan di suatu negara. Pada politik, terdapat tuntutan tersendiri terhadap kandidat perempuan. sistem politik mungkin memiliki “tuntutan” yang berbeda untuk kandidat perempuan dan dapat menjadi faktor penting terhadap perempuan (Caul 1999, 2001; Matland 1998; Giele dan Smock 1977; Kohn 1980). Pada ideologi gagasan mengenai peran dan posisi perempuan di dalam masyarakat dapat meningkatkan atau membatasi kemampuan perempuan untuk mencari kekuasaan (Paxton dan Kunovich 2003; Paxton 1997; Arceneaux 2001; McCammon dkk. 2001).

Penelitian Sheri Kunovich (2005) juga mengemukakan bahwa perlu untuk memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan ataupun menghambat perempuan untuk menjadi legislator perempuan. Partai merupakan sumber dukungan bagi kandidat perempuan untuk mendapatkan jabatan publik. Partai pada sistem perwakilan proposional dapat mendukung kandidat dengan menempatkan perempuan di posisi yang menguntungkan dan pada partai sistem

pluralitas-mayoritas dapat meningkatkan peluang kandidat pemilu dengan menyediakan sumber daya keuangan dan lain-lain untuk mendukung kampanye. Dukungan partai politik sangat penting dalam representasi perempuan, dengan mendukung secara berbeda-beda untuk calon, partai juga mempengaruhi proses pemilihan. Karena persentase caleg perempuan sangat menentukan persentase perempuan yang terpilih. Sehingga partai harus menghadapi tantangan dengan merekrut dan mendukung kandidat perempuan.

Relevansi penelitian Sheri Kunovich (2005) dengan penelitian ini adalah persamaan mengenai keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian Sheri Kunovich (2005) memberikan sumbangsih ide mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persentase perempuan di parlemen. Namun, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sheri Kunovich (2005). Dalam penelitian ini difokuskan pada peran partai gerindra dalam keterwakilan politik perempuan di parlemen pada pemilu DPR RI tahun 2019.

4. Penelitian Ella Syafputri (2014) berjudul *Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan* mengemukakan bahwa terdapat faktor hambatan dalam keterwakilan politik perempuan di parlemen Indonesia dan Korea yang relatif sama. Faktor-faktor penyebab rendahnya keterwakilan politik perempuan yaitu terdiri dari dua aspek, yang pertama adalah pandangan yang masih patriarki dan yang kedua adalah proses rekrutmen yang dilakukan partai politik terhadap kandidat calon legislatifnya. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik masih memprioritaskan laki-laki dibanding perempuan untuk berpolitik.

Penelitian Ella Syafputri (2014) juga mengemukakan bahwa biaya kampanye yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan berbeda. Di Indonesia, calon legislatif yang memiliki tujuan untuk menjadi anggota legislatif sebagian besar harus menanggung biaya kampanyenya. Sedangkan, di Korea Selatan biaya kampanye di atur oleh partai politik dan memiliki pengawasan internal maupun eksternal.

Penelitian Ella Syafputri (2014) memberikan relevansi terhadap penelitian ini mengenai dua aspek yang menjadi hambatan dalam keterwakilan politik

perempuan di parlemen, yaitu aspek pandangan yang masih patriarki dan aspek rekrutmen partai politiknya. Namun, penelitian ini fokus melihat perbandingan dari Negara Indonesia dan Korea Selatan terhadap faktor-faktor penghambat keterwakilan politik perempuan. Sedangkan penulis memfokuskan terhadap salah satu partai politik yang ada di Indonesia, sehingga penulis akan melengkapinya.

5. Penelitian Ikeu Kania, Dini Turipanam Alamanda, Khilda Fauzi (2020) berjudul *The Obstacles of Women's Parliamentary Representation in Indonesia* mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab rendahnya representasi perempuan di ranah politik. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pendidikan yang kurang dalam memberikan pemahaman pentingnya representasi perempuan di ranah politik dan menyebabkan hambatan-hambatan bagi perempuan yang ingin terjun ke ranah politik. Pentingnya peran dan peluang bagi perempuan untuk terjun ke ranah politik harus di prioritaskan sehingga perempuan mampu untuk berkontribusi dalam memperjuangkan hak-haknya. Adanya pandangan yang dapat menghambat representasi perempuan di ranah politik dapat berasal juga dari budaya patriarki di masyarakat, hal tersebut dapat menyebabkan kebijakan-kebijakan yang tidak ramah *gender*. Selain itu, adapun peran penting dari partai politik yang dapat mempengaruhi representasi perempuan dapat meningkat atau tidak meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana struktur partai dan kebijakan-kebijakan partai mengenai perempuan. Selain itu, partai politik efektif untuk meningkatkan representasi perempuan tergantung pada dukungan-dukungan, kemampuan dan keuangan yang perempuan miliki.

Penelitian Ikeu Kania, Dini Turipanam Alamanda, Khilda Fauzi (2020) memberikan relevansi bagi penulis dalam melihat faktor-faktor penyebab rendahnya representasi politik perempuan yang dapat berasal juga dari partai politiknya. Sehingga mendukung penelitian ini. Namun kekurangan dari penelitian ini tidak fokus pada salah satu partai politik dalam melihat faktor penyebab perempuan untuk terjun ke dalam parlemen yang juga berasal dari partai politiknya. Sehingga peneliti akan melengkapi kelemahan dari penelitian ini.

6. Penelitian Rhanty Syefira Salsabila (2016) berjudul *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Gerakan Indonesia Raya*

(GERINDRA) Kota Pekanbaru Tahun 2014 mengemukakan bahwa terdapat dua cara dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh Partai Gerindra Kota Pekanbaru Tahun 2014 yaitu 1. Menggunakan rekrutmen terbuka, memberikan peluang kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama dan *gender*. 2. Menggunakan rekrutmen tertutup, sistem rekrutmen tertutup ini dengan menggunakan *stelsel pasif* yang dilakukan di dalam internal partai saja. Dalam hal ini, tokoh yang di calonkan untuk menjadi calon anggota legislatif berasal dari kader atau fungsionaris baik di tingkat pusat ataupun cabang.

Penelitian Rhanty Syefira Salsabila (2016) juga mengemukakan bahwa posisi caleg perempuan dan laki-laki di Partai Gerindra berkedudukan sama dan dinilai sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki.

Penelitian Rhanty Syefira Salsabila (2016) memberikan relevansi bagi penulis dalam melihat pola rekrutmen yang dilakukan Partai Gerindra terhadap para calon anggota legislatifnya sehingga mendukung penelitian ini. Namun, kekurangan dari penelitian ini tidak fokus dalam melihat pola rekrutmen perempuan di Partai Gerindra dan pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan yang menyebabkan hambatan untuk perempuan dapat terjun ke ranah politik. Sehingga penulis akan melengkapi penelitian ini.

7. Penelitian Esty Ekawati (2017) berjudul Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Orde Baru mengemukakan bahwa partai politik memiliki fungsi dalam menjalankan rekrutmen untuk menjaga kelangsungan partai dan juga menyediakan jabatan-jabatan politik. Tetapi, dalam menjalankan fungsi rekrutmennya partai politik masih memiliki persoalan di dalam kandidasi untuk pemilu. Permasalahan kesiapan diri dan ekonomi menjadi hal penting yang harus dipenuhi oleh calon legislatif.

Penelitian Esty Ekawati (2017) juga menjelaskan berdasarkan hasil pemilu pasca Orde Baru, volatilitas keterwakilan dialami oleh kandidat perempuan. Adapun yang menjadi kendala-kendala bagi kandidat perempuan yaitu rendahnya motivasi dan kepercayaan diri perempuan untuk mengikuti kontestasi pemilu, keterbatasan modal ekonomi, budaya patriarki yang masih berkembang di

Indonesia dan pragmatisme partai politik yang mengutamakan caleg yang memiliki finansial ataupun popularitas yang memadai.

Penelitian Esty Ekawati (2017) mengemukakan pragmatisme yang terjadi menyebabkan perolehan suara caleg pada pemilu 2009, 2004, dan 2014 pada perempuan rendah yang berasal dari dinasti politik atau memiliki jaringan kekerabatan dengan elite politik. Jika hal ini masih terjadi dan tidak diatasi dikhawatirkan partai politik menjadi semakin pragmatis dan tidak inklusif terhadap perempuan dan berdampak pada kebijakan yang berkaitan dengan perempuan masih *male-dominated*.

Penelitian Esty Ekawati (2017) memberikan sumbangsih ide dan relevansi terhadap penelitian dalam melihat faktor-faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, penelitian ini akan memfokuskan keterwakilan perempuan pada Partai Gerindra. Sehingga penulis akan melengkapi penelitian ini.

8. Penelitian Jullie Ballington (2004) berjudul *Strengthening Internal Political Party Democracy: Candidate Recruitment from a Gender Perspective* mengemukakan bahwa pada keterwakilan perempuan, perempuan memiliki hambatan di dalam proses menuju parlemen. Hambatan itu dapat berasal juga dari aturan partai politik, pengaruh budaya dan organisasi.

Penelitian Jullie Ballington (2004) juga menjelaskan bahwa untuk mengimbangi hambatan yang dialami perempuan dapat melakukan beberapa langkah yaitu memberikan insentif kepada partai politik untuk mencalonkan lebih banyak perempuan, penerapan tindakan khusus seperti kuota perempuan.

Penelitian Jullie Ballington (2004) juga mengemukakan bahwa penerapan kuota perempuan berkontribusi di dalam peningkatan jumlah perempuan. Namun, yang harus diperhatikan adalah bagaimana perempuan tersebut aktif di dalam parlemen bukan hanya sekedar jumlah.

Penelitian Jullie Ballington (2004) memberikan relevansi terhadap penelitian ini dalam melihat upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan yang juga dapat dilakukan oleh partai politik. Namun, kekurangan penelitian ini tidak fokus terhadap salah satu partai politik dan penulis memfokuskan penelitian ini terhadap Partai Gerindra.

9. Penelitian Pradita Tyas Putri Andari (2018) berjudul Pola Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Penentuan Caleg Perempuan pada Pileg 2014 mengemukakan bahwa pola rekrutmen terhadap perempuan yang dilakukan partai PKS sama dengan pola rekrutmen yang dilakukan dengan laki-laki. Pola rekrutmen yang dilakukan memiliki sistem tertutup yaitu kader tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri melainkan kader partai PKS akan dipilih oleh partai untuk ditetapkan sebagai calon kandidat.

Penelitian Pradita Tyas Putri Andari (2018) juga menjelaskan bahwa partai PKS memprioritaskan kader yang berasal dari internal partai terlebih dahulu, setelah terpenuhi kuota untuk kader perempuan yang berasal dari partai selanjutnya rekrutmen caleg yang berasal dari non kader partai PKS dapat dilakukan dengan cara melakukan silaturahmi, pengurus partai yaitu ketua mengunjungi kerumah kandidat non kader partai PKS dengan maksud mencalonkannya.

Penelitian Pradita Tyas Putri Andari (2018) juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan di dalam pelaksanaan rekrutmen yang berlangsung yaitu tahapan penjangkaran, penentuan caleg, presentase caleg melalui pemira, pengolahan hasil presentase yang di dapatkan oleh caleg dalam pemira oleh Tim Pemenangan Daerah, penetapan caleg, dan penentuan nomor urut kursi.

Penelitian Pradita Tyas Putri Andari (2018) memberikan relevansi terhadap penelitian ini mengenai keterwakilan perempuan yang dapat dilihat dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Namun, perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objeknya. Penulis memfokuskan terhadap Partai Gerindra.

10. Penelitian Very Wahyudi (2018) berjudul Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender mengemukakan bahwa dalam persoalan keterwakilan perempuan terdapat tantangan yang berasal dari internal ataupun eksternal. Kendala internal yang dimaksud berasal dari lemahnya kualitas sumber daya manusia sebagian besar kaum perempuan, terbatasnya jumlah perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi yang memumpuni di bidang politik, kurangnya rasa percaya diri. Kendala yang berasal dari eksternal yaitu kultur yang

cenderung patriarki, kurang nya ruang yang diberikan untuk perempuan terlibat pada ranah politik, sikap laki-laki yang masih meremekan perempuan.

Penelitian Very Wahyudi (2018) juga menjelaskan bahwa kendala psikologis dan ideologis juga dapat dialami oleh perempuan ketika memasuki persaingan di ranah politik khususnya parlemen karena masih adanya ideologi *gender* dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya diberikan kepada perempuan dan laki-laki, kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri. Adanya budaya ketakutan yang pada akhirnya mencegah perempuan untuk berkompetensi di dalam pemilihan dan berpartisipasi.

Penelitian Very Wahyudi (2018) juga menjelaskan bahwa terdapat tiga tantangan yang dialami perempuan untuk menjadi caleg perempuan yaitu modal politik, modal sosial, modal ekonomi, yang menjadi permasalahan caleg perempuan yaitu ada pada kendala ideologis dan psikologis.

Penelitian Very Wahyudi (2018) memberikan relevansi terhadap penelitian ini mengenai kendala-kendala yang dialami dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Namun, penelitian ini tidak menjelaskan kendala-kendala dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan yang juga dapat berasal dari partai politiknya. Sehingga penulis akan melengkapi penelitian ini.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas terdapat pertanyaan dari penelitian ini yaitu “bagaimana rekrutmen dalam partai gerindra mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di parlemen pada pemilu legislatif DPR RI 2019?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekrutmen dalam Partai Gerindra yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di parlemen pada pemilu legislatif DPR RI tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan teori Richard E. Matland (2002)

1.5 Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan signifikansi secara akademis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan terhadap pengembangan penelitian yang berhubungan dengan kesetaraan *gender* sehingga mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca ataupun mahasiswa/i.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu untuk mengeksplor dan mengembangkan penelitian sebelumnya dan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis dan praktis. Adapun manfaat secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau *literature* sehingga dapat berkontribusi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap bidang politik mengenai keterwakilan politik perempuan dan penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi tambahan yang memiliki fokus tentang peran partai dalam rekrutmen keterwakilan politik perempuan. Dan manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi referensi dan informasi tambahan kepada para pembaca mengenai peran partai politik terhadap rekrutmen keterwakilan perempuan.

1.7 Sistematika Pembabakan

BAB I :PENDAHULUAN

Memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian dan sistematika pembahasan dan penelitian terdahulu.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat landasan teori dan kerangka konsep

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini memuat gambaran mengenai metode penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, penentuan *key informan*, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dengan pedoman wawancara, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sesuai. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu: 1) Deskripsi objek penelitian; 2) hasil penelitian yaitu memaparkan hasil temuan di lapangan mengenai rekrutmen keterwakilan politik perempuan; 3) Pembahasan yang menjelaskan hasil temuan di lapangan dan memaparkan hasil analisis peneliti berdasarkan data, teori dan konsep penelitian.

BAB V : PENUTUP (KESIMPULAN)

Bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab permasalahan dan penyelesaian penelitian, dan saran merupakan alternatif untuk memberikan masukan dalam menjawab permasalahan dan kelemahan yang ada di dalam penelitian ini.

1.8 Keterbatasan Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan beberapa keterbatasan di dalam proses penyusunan skripsi ini. Keterbatasan pertama adalah akses untuk mewawancarai informan. Sebab peneliti tidak memiliki banyak akses atau kontak yang dapat dihubungi untuk melakukan wawancara, terutama saat pandemi Covid-19. Peneliti juga menggunakan informasi yang berasal dari media *online* terkait hubungan kekerabatan antara caleg perempuan dan partai politik sehingga menghindari adanya bias dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap rekrutmen perempuan partai gerindra.